

EVALUASI FUNGSI DAN PERAN  
KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH DI DESA KOMBA  
KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA



**BOSOWA**  
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.sos) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas  
Ilmu Sosiala dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar

Oleh:

RIDWAN  
4511021051

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS “45” MAKASSAR

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari, *Selasa tanggal delapan bulan tuju tahun dua ribu empat belas*, Skripsi dengan Judul ***“Evaluasi Fungsi dan Peran Kepala Desa di Era Otonomi Daerah di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara”***

N a m a : **RIDWAN**

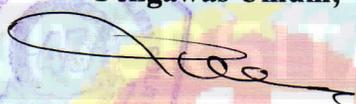
Nomor Stambuk : **4511021051**

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “45” Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

**Pengawas Umum;**

  
**Dra. Hj. Juharni, M.Si.**

Dekan FISIP. Universitas “45”

**Panitia Ujian;**

  
**Dr. Syamsuddin Maidun, M.Pd.**

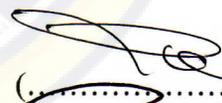
Ketua

  
**Drs. H. Misbahuddin Achmad, M.Si.**

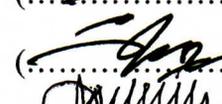
Sekretaris

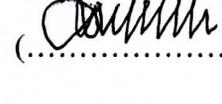
**Tim Penguji;**

1. Dra. Hj. Juharni, M.Si.
2. Drs. M. Natsir Tompo, M.Si.
3. Drs. Uddin B.Sore, SH., M.Si.
4. Dra. Asmirah, M.Si.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang terucap selain ungkapan rasa syukur kepada Zat Maha Agung yang kekuasaann-Nya meliputi langit dan bumi serta yang ada diantara keduanya. Sang pemilik kasih rahmat dan hidayah yang senantiasa dilimpahkan pada umat-Nya. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabat serta orang-orang yang tetap istiqomah dijalann-Nya.

Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan studi serta menghadirkan karya yang sederhana ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar. Lewat lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta kebersamaan selama dalam proses penyelesaian studi hingga terselesaikannya karya sederhana ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Ayahanda Junait dan Ibunda Darwati tercinta yang senantiasa memberi cinta, do'a, spirit, serta pengharapan yang tiada henti untuk kebaikan penulis.

Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Bapak Aksa Mahmud selaku ketua Yayasan Universitas "45" Makassar.  
Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH. Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.  
Ibu Dra. Juharni, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bapak Drs. Misbahuddin Achmad, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus juga sebagai Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya disela kesibukan beliau untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian. Drs. Uddin B. Sore, SH., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian.

Bapak dan ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara Universitas "45" Makassar yang telah membina penulis selama ini. Bapak dan Ibu pegawai perpustakaan yang telah melayani dengan baik terutama dalam hal meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan sampai selesainya skripsi ini.

Bapak Kepala Desa Komba dan Ibu serta seluruh pegawai dan staf Pemerintahan Desa serta masyarakat Desa Komba.

Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Hasan, Ilyas, Muslihin dan Malik, Genggamlah mutiara kebahagiaan dalam kebersamaan kita yang kelak akan menjadi legenda dunia persahabatan.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon semoga semua pihak yang telah membantu dalam upaya penyusunan skripsi ini diberikan amalan yang

setimpal. Semoga hal yang penulis perbuat dapat menjadi sumbangan bagi kemajuan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Indonesia utamanya bidang studi Administrasi dan semoga bernilai ibadah disisi-Nya . Aamiin...

Makassar, 5 September 2014



## DAFTAR ISI

<b>A. HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>B. HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>C. HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>D. KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>E. DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
 <b>F. BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA KONSEP.....	5
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PENGERTIAN EVALUASI .....	11
B. FUNGSI DAN PERAN KEPALA DESA.....	12
C. DESA DAN OTONOMI DAERAH.....	21
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
D. KEADAAN GEOGRAFIS.....	26
E. KEADAAN DEMOGRAFIS.....	27
F. STRUKTUR ORGANISASI.....	29

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. PEMBANGUNAN DI DESA KOMBA .....	31
B. PEMBINAAN DI DESA KOMBA.....	37

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50



## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa adalah salah satu bentuk daerah yang khas di Indonesia. Desa memiliki latar belakang historis dan filosofis yang jelas dan kuat.

Desa hadir sebelum tata pemerintahan tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, deregulasi dan penataan desa paska beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Pengaturan desa yang ketat dan penyeragamannya di seluruh Indonesia menjadi salah satu sumber hilangnya potensi kemandirian desa, khususnya di luar Jawa.

Sejarah juga mencatat bahwa regulasi desa selama ini cenderung mengedepankan pengaturan pemerintahan desa untuk mempercepat kemandirian, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akibatnya, terjadi pertumbuhan desa yang pesat.

Kondisi ini mempengaruhi percepatan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Permasalahan lain tidak kalah berat membebani desa adalah himpitan kemiskinan. Data per September 2012 mencatat ada 63,25 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan. Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga semakin sulit untuk mandiri.

Dibutuhkan ikhtiar komprehensif untuk menegakkan kembali eksistensi desa sebagai daerah otonom istimewa.

Menyadari beban berat desa, diperlukan pengaturan desa yang bersifat multiperspektif. Agar desa mandiri dan masyarakatnya sejahtera, yang diperlukan tidak hanya penataan aspek pemerintahan, tetapi juga yang berkaitan dengan aspek kewilayahan, tata kehidupan dan adat istiadat, serta pengembangan potensi daerah.

Demikian juga dengan hak-hak tradisional yang perlu dilestarikan sehingga pemerintah desa mendapat kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang ada.

Partisipasi masyarakat, diarahkan untuk sebesar-besarnya mengakomodasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan setiap desa. Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk mengembangkan kemandirian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penggalan dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Dalam prakteknya dalam otonomi daerah yang dimaksud, kita dapat mengenal dua istilah yakni desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah berarti sebagian besar kewajiban Pemerintah Pusat kini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini pemerintahan desa, tentunya dengan harapan dapat terlaksana secara lebih baik dan terfokus atau tepat sasaran.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa komba mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi Desa komba. Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan

Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa, khususnya di desa Komba. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Manajemen Pelayanan Desa

Dengan penguatan tersebut, pemerintah desa dan masyarakat mempunyai hak mengatur dan mengurus kesatuan masyarakat hukumnya sesuai adat istiadat yang berkembang, mampu menggali sumber pendapatan sekaligus mengelolanya, serta terwujudnya harmonisasi, sinergi antarlembaga desa yang ada, seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga adat, serta lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, dan karang taruna. Hal ini diperkuat dengan pembiayaan yang bersumber dari dana yang mungkin menurut RUU, seperti bantuan dana untuk desa mengiringi program/kegiatan di desa, Memperhatikan kondisi dan dinamika tersebut, menjadi sangat relevan bahwa kepala desa memegang peranan sangat penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik.

Dari uraian di atas maka penulis, tertarik untuk mengkaji peran kepala desa dalam era otonomi daerah khususnya di desa komba kecamatan limbong kabupaten. Luwu utara

## B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara spesifik permasalahan penelitian

ini dijabarkan kedalam pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Fungsi dan Peran Kepala Desa dalam Membangun Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara ?
2. Faktor Apakah yang Menjadi Penghambat Kepala Desa Komba dalam Membina Masyarakat Desa di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Ingin Mengetahui Sejauh mana Pembangunan di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara.
2. Ingin Mengetahui Sejauh mana Pembinaan Masyarakat Desa di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara.

## D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan memperkaya khasanah ilmiah dalam lingkup ilmu administrasi Negara utamanya dalam rangka membicarakan tentang peran kepala desa di era otonomi daerah yang kini berlangsung di Indonesia

2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kinerja Kepala Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara yang tentunya ini dapat menjadi masukan yang membangun demi kemajuan dari Desa Komba itu sendiri.
3. Selanjutnya manfaat yang diharapkan berupa pengetahuan mengenai peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Otonomi Daerah, yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya yang ingin dikembangkan.

#### E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan peran untuk mencapai desa yang berkembang dan mandiri, adapun fungsi dan peran yang harus diemban kepala desa adalah:

1. Memimpin desa

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin

## 2. Membangun desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam Wilayah pembangunan masyarakat desa maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan Daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan, kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

## 3. Membina kehidupan masyarakat desa

Usaha untuk membina masyarakat desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa

#### 4. Mengkordinasi pembangunan desa

Optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.

#### 5. Melaksanakan tugas atasan

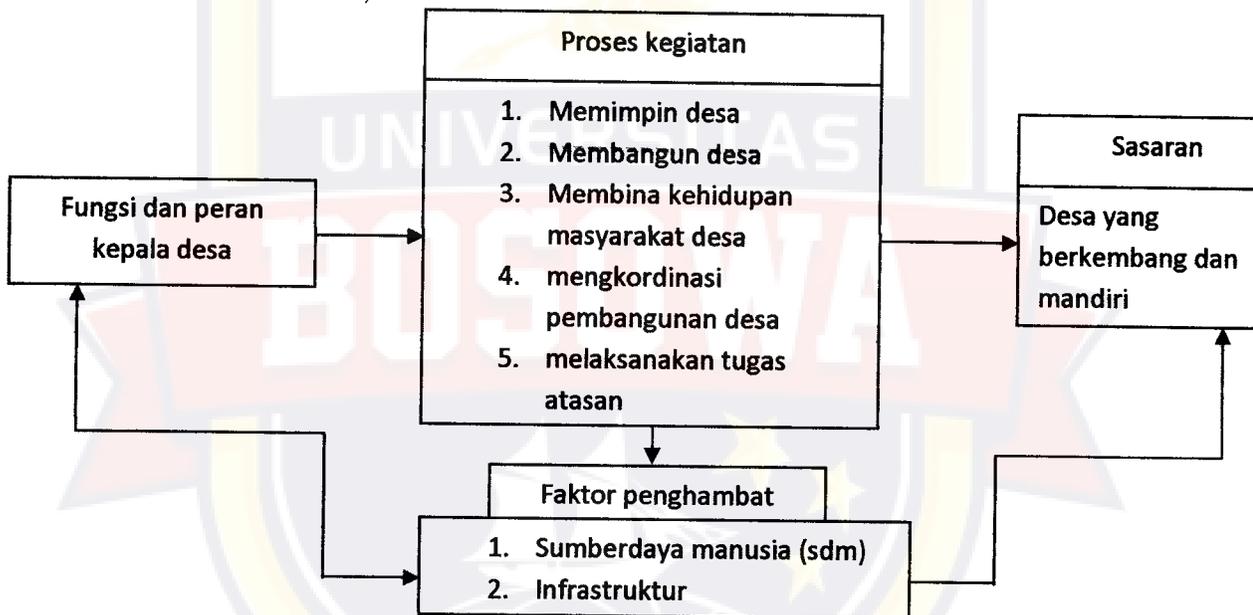
Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Jika kelima fungsi dan peran kepala desa tersebut terlaksana dengan baik, maka desa akan mencapai kesejahteraan dan akan mampu untuk berkembang dan mandiri.

Namun ada beberapa faktor penghambat sehingga desa tetap jalan ditempat, tetap dalam kemiskinan serta tidak mampu untuk berkembang, khususnya di desa-desa terpencil. Faktor tersebut adalah, kurangnya sumberdaya manusia (sdm) dan infrastruktur yang sangat sedikit sehingga pengembangan desa terkendala.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut:



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dipakai dalam penulisan ini adalah deskriptif. Dimana yang akan dapat menjelaskan dan menggambarkan evaluasi kinerja kepala desa dalam menjalankan perannya di era otonomi daerah di desa komba kecamatan limbong kabupaten luwu utara

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data Primer. Data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber literatur yaitu berupa penelitian langsung ke lapangan, data dari pemerintahan setempat, dan sumber-sumber lain yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara (interview) yaitu, cara memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab kepada responden yang telah ditentukan
- Observasi (pengamatan) yaitu, memperoleh data dan informasi secara langsung pada objek yang akan diteliti
- Questioner (angket), digunakan untuk memperjelas dan melengkapi data yang telah di peroleh

#### 4. Populasi dan sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan warga desa komba kecamatan limbong kabupaten luwu utara yang berjumlah 84 KK
- b. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah melalui sampel jenuh, yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel, sebanyak 84 KK.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

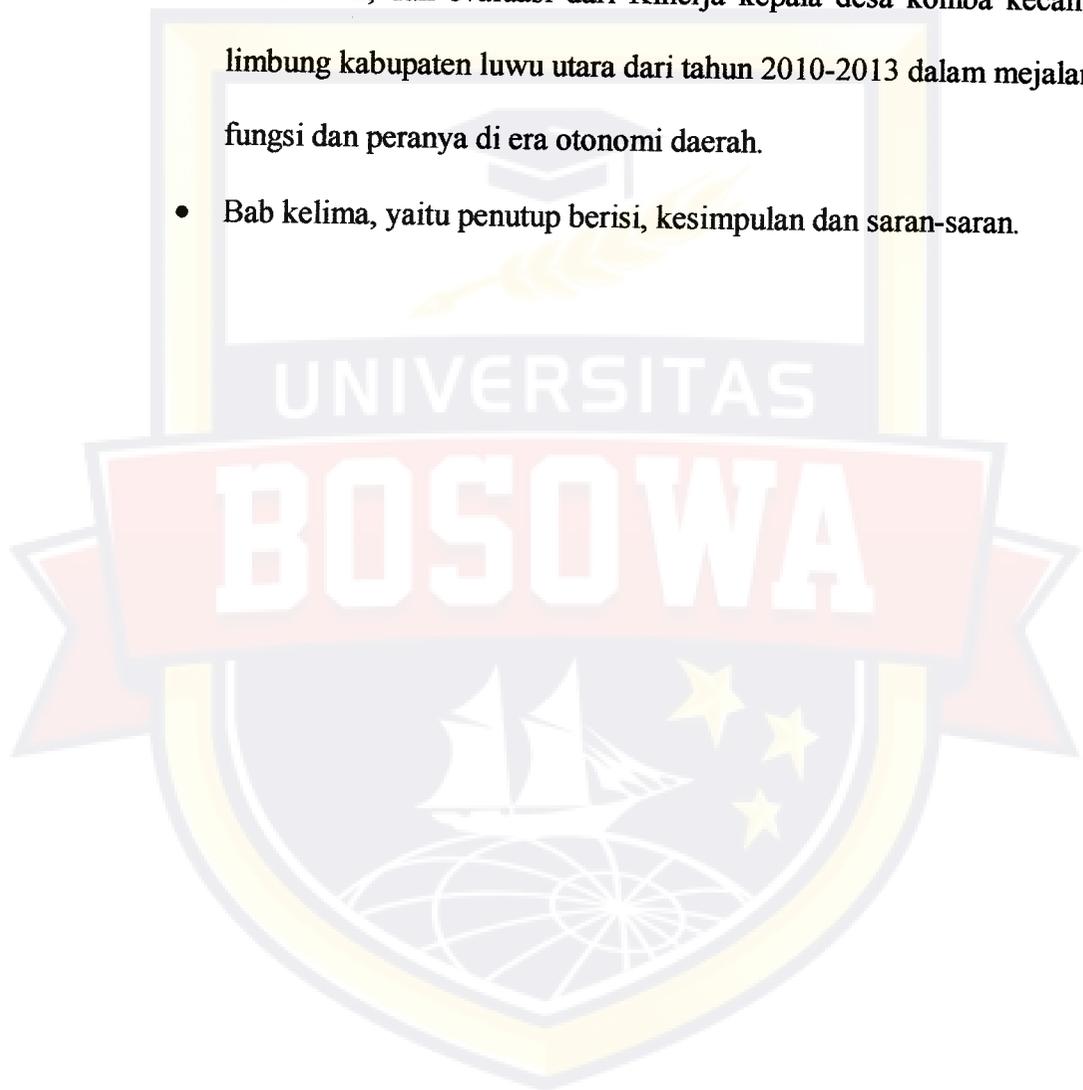
#### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut :

- Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penelusuran kepustakaan dan literatur tentang konsep *evaluasi, fungsi dan peran kepala desa, dan Otonomi Daerah* ,
- Bab ketiga, gambaran umum obyek penelitian, berisi profil dari hasil tempat penelitian yakni desa komba kecamatan limbong kabupaten

luwu utara, struktur organisasi kantor desa komba dan keadaan pegawai pada kantor desa komba.

- Bab keempat, yaitu analisis penelitian berisi Dampak dari Otonomi Daerah pada kemajuan desa komba kecamatan limbung kabupaten luwu utara, dan evaluasi dari Kinerja kepala desa komba kecamatan limbung kabupaten luwu utara dari tahun 2010-2013 dalam menjalankan fungsi dan peranya di era otonomi daerah.
- Bab kelima, yaitu penutup berisi, kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai.

Adapun pengertian evaluasi menurut para ahli:

MEHRENS & LELMAN, 1978 : Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif - alternatif keputusan

SUDIJONO, 1996 ; Evaluasi pada dasarnya merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi , yaitu:

1. Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Membahas tentang evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu.

2. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan “nilai dan arti”.
  - Pemberian nilai dilakukan apabila seorang evaluator memberikan pertimbangannya mengenai evaluan tanpa menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat dari luar. Jadi, pertimbangan yang diberikan sepenuhnya berdasarkan apa evaluan itu sendiri.
  - Arti, berhubungan dengan posisi dan peranan evaluasi dalam suatu konteks tertentu.
3. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (*judgement*) yang merupakan konsep dasar dari evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang dievaluasi.
4. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria ini penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan:
  - Hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
  - Evaluator lebih percaya diri.
  - Menghindari adanya unsur subjektivitas.
  - Memungkinkan hasil evaluasi akan sama, sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda.

- Memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran

## B. FUNGSI DAN PERAN KEPALA DESA

### 1. Memimpin Desa

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin.

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh S. Prayudi Atmosudirdjo (2002:212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

- a. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
- b. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri

tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.

- c. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
- d. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu.

Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

## 2. Membangun Desa

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, Desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam Wilayah pembangunan masyarakat Desa atau khususnya Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan Daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerana transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan

asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan

pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

### 3. Membina Kehidupan Masyarakat Desa

#### Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama

(Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang – undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, PKK merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang

memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

Anggota PKK terdiri atas ibu – ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah.

PKK ber tujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK memberi bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan pengobatan gratis.

#### 4. Mengkordinasi Pembangunan Desa

Dalam hal fungsi Kepala Desa sebagai Kordinator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Fungsi Kepala Desa sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya: (1). Kepala Desa harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik (2). Kepala Desa harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dengan adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa harus bisa menyelesaikan

hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Desa harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.

#### 5. Melaksanakan Tugas Atasan

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Provinsi sebagai Daerah Otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan

sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

### C. DESA DAN OTONOMI DAERAH

#### 1. Pengertian Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi desa:

UU No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

SUTARDJO KARTODIKUSUMO : "Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa,

disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

## 2. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi, istilah "otonomi" berasal dari bahasa latin, *autos* yang berarti *sendiri*, dan *nomos* yang berarti *aturan*.

Berdasarkan etimologi tersebut, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintahan daerah di Indonesia begitu saja menerima program dari pemerintah pusat sehingga ada keseragaman program di setiap daerah. Akan tetapi, setelah adanya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

Menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah: “Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

Sedangkan, Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah: Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Dapat dilihat bahwa secara umum definisi yang diberikan oleh para ahli atau pakar mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan. Jika pengertian tersebut dirangkum, maka akan tampak unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.

Kedua : kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

Ketiga : kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- Asas Desentralisasi: Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Asas Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan.

- Asas Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah dalam bentuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, menumbuhkembangkan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional dengan mengingat asal-usul suatu daerah, kemajemukan dan karakteristik, serta potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## 5. KOMPOSISI PEGAWAI

### a. Jumlah pegawai

Berdasarkan data dari bagian administrasi dan kepegawaian kantor desa komba, jumlah pegawai pada kantor tersebut adalah 7 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4**

**Jumlah Pegawai Pada Kantor Desa Komba Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Desa	1 orang
2.	Sekertaris	-
3.	Kaur Keuangan	1 orang
4.	Kaur Umum	1 orang
5.	Kaur Pemerintahan	1 orang
6.	Kaur Pembangunan	1 orang
7.	Kepala Dusun Komba	1 orang
8.	Kepala Dusun Pelawean	1 orang
9.	Kepala Dusun Lasa	1 orang
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>8 orang</b>

*Sumber: Kantor Desa Komba tahun 2013*

b. Tingkat pendidikan pegawai

Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pegawai adalah dengan melihat latar belakang pendidikan formal yang telah diperolehnya. Sehubungan dengan pegawai yang ada pada Kantor Desa Komba, tingkatnya pendidikan formal yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5**

**Tingkat Pendidikan di Kantor Desa Komba Kecamatan Limbong**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SMP	4
2.	SMA	3

*Sumber: Kantor Desa Komba tahun 2013*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembangunan di Desa Komba

Pembangunan di Desa Komba meliputi bidang pengairan kesawah-sawah warga, jalan tani, jembatan gantung dan SMP Satu Atap Limbong

Menurut wawancara dengan Kepala Desa Komba tentang pembangunan infrastruktur tersebut diatas, dianggap telah berhasil di kerjakan.

“sejauh ini pembangunan yang telah berhasil kami kerjakan meliputi berbagai sektor, seperti membangun penampungan air di Sawah warga, agar pengairan kesawah-sawa warga lancar, membangun dan merabat beton jalan tani agar tidak longsor, membangun jembatan gantung yang menghubungkan antar dusun dan membangun sekolah SMP satu atap Limbong. Alhamdulillah, apa yang telah berhasil kami bangun di Desa Komba ini telah mendapatkan respon yang sangat baik dari Masyarakat, semoga kedepannya kami bisa mengembangkan lagi dan membuat bangunan-bangunan baru yang tentu saja bermanfaat bagi Masyarakat di Desa Komba ini”. (18 Maret 2014)

Terkait dengan pembangunan pengairan kesawah-sawah warga diperoleh persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

**Tabel 6.**

**Tanggapan Responden terhadap pengairan kesawah-sawah warga di  
Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Bermanfaat	69	86
2	Bermanfaat	11	9
3	Cukup Bermanfaat	4	5
4	Kurang Bermanfaat	-	-
5	Tidak Bermanfaat	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa persepsi Responden terhadap pembangunan pengairan kesawah-sawah warga di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 69 KK atau 86 % responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak 11 KK atau 9 % responden menilai bermanfaat, dan sejumlah 4 KK atau 5 % responden memberi tanggapan cukup bermanfaat. Dengan demikian pembangunan pengairan kesawah-sawa sangat bermanfaat bagi para warga

Menurut wawancara dengan ketua kelompok tani diperoleh persepsi bahwa pembangunan pengairan sawah sangat mendukung peningkatan produksi pertanian

“kami sangat berterima kasi kepada Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa, karena dengan adanya pengairan ke sawah-sawah warga, sawah kami kini tidak kekeringan lagi dan hasil panen meningkat dari

musim panen sebelumnya kami berharap agar ini berjalan terus walaupun Kepala Desa berganti.(Maskir 19 Maret 2014).

Pembangunan jalan tani menurut persepsi masyarakat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**  
**Tanggapan Responden terhadap Jalan tani warga di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Bermanfaat	70	85
2	Bermanfaat	10	10
3	Cukup Bermanfaat	4	5
4	Kurang Bermanfaat	-	-
5	Tidak Bermanfaat	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan Responden terhadap Jalan tani warga di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 70 KK atau 85 % Responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak 10 KK atau 10 % Responden menilai bermanfaat, sejumlah 4 KK atau 5 % Responden memberi tanggapan cukup bermanfaat. Dari prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, dapat lihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pembangunan Jalan tani di Desa Komba.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh Masyarakat memberikan tanggapan bahwa jalan tani memberikan mafaat yang sanga baik bagi masyarakat Desa.

Berikut wawancara peneliti kepada Salah satu masyarakat:

“dengan adanya jalan tani di Desa Komba, jalan yang menghubungkan kami ke Sawah dan Kebun-kebun sangat tersa manfaatnya dan sudah sangat mudah dilalui oleh sepeda motor, dimana sebelumnya masyarakat harus berjalan kaki untuk sampai ke sawah atupun kebun, kini Alhamdulillah tidak lagi demikian, apalagi jalan tani ini dirabat beton sehingga sangat memudahkan kami untuk saling membantu mengangkut hasil panen kami jika musim panen tiba”.(Amban 19 Maret 2014)

Pembangunan Jembatan Gantung menurut persepsi masyarakat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8.**  
**Tanggapan Responden terhadap Jembatan Gantung di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Bermanfaat	75	90
2	Bermanfaat	5	5
3	Cukup Bermanfaat	4	5
4	Kurang Bermanfaat	-	-
5	Tidak Bermanfaat	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan Responden terhadap Jembatan Gantung di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 75 KK atau 90 % Responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak 5 KK atau 5 % Responden menilai bermanfaat, sejumlah 4 KK atau 5 % Responden memberi tanggapan cukup bermanfaat. Dapat disimpulkan bahwa prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pembangunan Jembatan Gantung di Desa Komba.

Sejalan dengan respon masyarakat diatas, wawancara peneliti dengan kepala dusun lasa sangat berterimakasih karena pembangunan jembatan gantung telah dirasakan manfaatnya oleh warga Desa.

“saya sangat berterimakasih kepada Kepala Desa, sebelum adanya jembatan gantung, kami dari dusun lasa harus melewati sungai untuk sampai ke dusun komba dan pelawean jika ada pertemuan perangkat desa dan pertemuan seluruh masyarakat desa serta jika musim panen tiba, karena pusat pemerintahan Desa berada di dusun Komba dan Dusun Pelawean dan pertanian kami sebagian ada di dua dusun tersebut, begitu juga dengan anak-anak kami dimana seperti kita tahu bahwa sekolah letaknya di dusun komba jadi anak-anak kami setiap hari harus melewati sungai untuk bisa bersekolah. kalau air sungai lagi kencang mereka terpaksa tidak kesekolah karena takut terbawa arus, tapi setelah dibangun jembatan gantung di dusun lasa transportasi kami ke dua dusun sangat mudah, jadi kalau ada pertemuan masyarakat desa dam musim panen tiba, kami tidak susah lagi menyebrangi sungai untuk sampai ke dua dusun tersebut”. (Ardi 20 Maret 2014)

Adapun dengan pembangunan SMP Satu Atap Limbong diperoleh persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

**Tabel 9.**

**Tanggapan Responden terhadap Sekolah SMP Satu Atap Limbong di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Bermanfaat	70	85
2	Bermanfaat	10	10
3	Cukup Bermanfaat	4	5
4	Kurang Bermanfaat	-	-
5	Tidak Bermanfaat	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Dari tabel tersebut di atas, maka tampak terlihat persepsi Responden terhadap Sekolah SMP Satu Atap Limbong di Desa Komba sebagai berikut

: sejumlah 70 KK atau 85 % Responden menilai sangat bermanfaat, sebanyak 10 KK atau 10 % Responden menilai bermanfaat, sejumlah 5 KK atau 5 % Responden memberi tanggapan cukup bermanfaat. Berdasarkan prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pembangunan di sektor pembangunan Sekolah SMP Satu Atap Limbong di Desa Komba.

Dari wawancara peneliti kepada Kepala Sekolah SDN Komba. sekaligus tokoh pemerhati pendidikan, dimana peneliti menanyakan tentang “bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pembangunan yang telah Kepala Desa lakukan khususnya di bidang pendidikan”:

“Pemerintah Desa Komba, sungguhlah sangat besar peranannya dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di desa kami, dan yang sangat kami kagumi adalah pembangunan sarana pendidikan yang sudah lama kami impikan khususnya pembangunan gedung sekolah setingkat SMP, sehingga mengurangi beban biaya dan resiko anak-anak kami tidak bersekolah, yang tadinya putus sekolah setelah tamat SD. Karena SMP jauh dari desa kami, sekarang tidak lagi karena SMP sudah ada di desa kami” Kami berharap semua bidang juga bisa dibangun terutama sarana dan prsarana olahraga”(Junait 21 Maret 2014).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa cukup memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warganya.

## B. Pembinaan Terhadap Masyarakat Desa di Desa Komba

Tidak jauh beda dengan Pembangunan di Desa Komba, Pemerintah Desa juga mengadakan pembinaan terhadap Masyarakat Desa dalam berbagai bidang, seperti pembinaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, pembinaan olahraga, pemberdayaan PKK dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR),

Menurut wawancara dengan kepala desa komba terkait dengan pembinaan masyarakat desa seperti disebutkan diatas dianggap sudah efektif walau masihperlu ditingkatkan lagi.

“sejauh ini pembinaan yang telah kami lakukan mendapatkan respon yang sangat baik dari Masyarakat dan sudah efektif sjauh ini, walupun masih perlu untuk ditingkatkan lagi, tidak jauh beda dengan pembangunan di Desa Komba, kami juga melakukan pembinaan di berbagai bidang, seperti pembinaan Kelompok Tani, pembinaan Keagamaan, pembinaan Olahraga, pemberdayaan PKK dan penerapan KTR (Kawasan tanpa Rokok)”. (Lancar 19 Maret 2014)

Terkait dengan pembinaan kelompok tani diperoleh persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

**Tabel 10.**

**Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Kelompok Tani di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Efektif	60	65
2	Efektif	10	20
3	Cukup Efektif	5	5
4	Kurang Efektif	5	5
5	Tidak Efektif	4	5
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa persepsi responden terhadap Pembinaan Kelompok Tani di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 60 KK atau 65 % responden menilai sangat efektif, sebanyak 10 KK atau 20 % responden menilai efektif, sejumlah 5 KK atau 5 % responden memberi tanggapan cukup efektif, sejumlah 5 KK atau 5 % responden member tanggapan kurang efektif dan sejumlah 4 KK atau 5 % responden member tanggapan tidak efektif. Dengan demikian pembinaan kelompok tani sangat bermanfaat bagi warga desa.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Komba diperoleh persepsi bahwa, masyarakat sangat antusias mengikuti setiap kegiatan di desa komba.

“Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah kami seperti Kelompok tani, Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangunan di desa kami sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa. Pembinaan kelompok tani, yaitu kelompok tani Palasa longkon juga sangat efektif terbukti dengan pembinaan yang diprogramkan Kepala Desa dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada Pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini

dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil.” (Ngilli 22 Maret 2014)

Pembinaan keagamaan menurut persepsi masyarakat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11.**

**Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Keagamaan di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Efektif	70	80
2	Efektif	10	15
3	Cukup Efektif	5	5
4	Kurang Efektif	-	-
5	Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Dari tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan Responden terhadap Pembinaan Kelompok Tani di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 70 KK atau 80 % Responden menilai sangat efektif, sebanyak 10 KK atau 15 % Responden menilai efektif, sejumlah 5 KK atau 5 % Responden memberi tanggapan cukup efektif, Berdasarkan prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pembinaan keagamaan di Desa Komba, walaupun masih perlu ditingkatkan lagi.

Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda. Contohnya mengadakan pengajian setiap jumat serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah.

Pembinaan yang paling giat dilakukan oleh Pemerintah Desa Komba adalah pembinaan dalam kegiatan keagamaan, sosial budaya dan pembinaan kepada ibu-ibu pkk. Fasilitasi kegiatan ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat seni dan ceramah agama yang biasanya didatangkan dari luar desa sebagaimana yang disampaikan oleh **Ust. Rapang** seorang tokoh agama di Desa Komba.

“Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadah setiap satu minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturahmi dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin diadakan setiap Jumat yang disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Mungkin tujuan dari pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda” (Ust. Rapang 23 Maret 2014).

Adapun Pembinaan Olahraga menurut persepsi masyarakat dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 12.**

**Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Olahraga di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Efektif	50	65
2	Efektif	10	10
3	Cukup Efektif	10	10
4	Kurang Efektif	10	10
5	Tidak Efektif	4	5
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan Responden terhadap Pembinaan Olahraga di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 50 KK atau 67 % Responden menilai sangat efektif, sebanyak 10 KK atau 10 % Responden menilai efektif, sejumlah 10 KK atau 10 % Responden memberi tanggapan cukup efektif, sebanyak 10 KK atau 10 % Responden member tanggapan Kurang efektif dan sebanyak 4 KK atau 5% Responden member tanggapan Tidak efektif, Berdasarkan prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pembinaan Olahraga di Desa Komba, walaupun masih perlu ditingkatkan lagi.

Sadar akan pentingnya Olahraga, Kepala Desa komba memberikan pembinaan kepada Masyarakat Desa Komba, salah satunya mendatangkan pelatih olahraga seperti sepak bola, bola villy dan olahraga lainnya sebagai mana yang disampaikan kepala desa komba.

“ Melihat antusias masyarakat kususnya para pemuda desa yang sangat menyukai olahraga, untuk itu saya mendatangkan pelatih dari luar untuk menamba pengetahuan mereka dalam bidang olahraga, dan mereka sangat gembira dengan adanya pembinaan tersebut” ( Lanar 24 Maret 2014)

Selain itu ketua remaja juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kepala desa komba atas perhatiannya di bidang olahraga.

“kami sangat berterima kasih kepada Kepala Desa karena dengan adanya pelatih olahraga, masyarakat sangat antusias dan menyambut gembira, harapan kami semoga ini terus berjalan lama”. (Irham 24 Maret 2014)

Terkait dengan pemberdayaan PKK diperoleh persepsi masyarakat seperti tabel berikut:

**Tabel 13.**

**Berikut tanggapan dari responden terkait pembinaan Keagamaan di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Efektif	70	80
2	Efektif	10	15
3	Cukup Efektif	5	5
4	Kurang Efektif	-	-
5	Tidak Efektif	-	-
	Jumlah	84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tampak bahwa tanggapan Responden terhadap Pembinaan Kelompok Tani di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 70 KK atau 80 % Responden menilai sangat efektif, sebanyak 10 KK atau 15 % Responden menilai efektif, dan sejumlah 5 KK atau 5 % Responden memberi tanggapan cukup efektif, dari prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa sangat efektif dalam menjalankan pemberdayaan pkk di Desa Komba.

Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap tanggal 14 di adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu, baik ibu-ibu menyusui, nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, bcg, dpt, oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu

yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa dan juga di Desa Komba ini telah dibangun PUSKESDES (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa secara gratis bagi yang memiliki kartu keluarga dan KTP. Apabila tidak menunjukkan kedua identitas tersebut maka pasien akan dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp.5.000, ini membuktikan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak kesehatan sangat erat demi terlaksananya tertib administrasi di bidang pemerintahan desa.

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PKK, beliau mengatakan:

“Pemberian sanksi administrasi bagi warga yang tidak memiliki KTP dan KK ketika ingin mendapatkan pengobatan gratis berupa biaya sebesar Rp.5.000 bukanlah bermaksud untuk memberatkan warga desa melainkan mengajak masyarakat untuk tertib administrasi. Itupun tidak semua warga dikenakan biaya jika tidak memiliki KTP dan KK, karena warga yang mendapat kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan dibebaskan dari segala biaya serta dana yang terkumpul dari denda administrasi diserahkan kembali ke petugas kesehatan untuk di manfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun sejak dibelakukannya ktp elektronik masyarakat Desa Komba semua telah memiliki ktp, jadai tidak lagi mendapatkan denda” (Darwati 25 Maret 2014).

Terkait dengan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Responden memberi persepsi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 14.**

**Berikut tanggapan dari responden terkait pemberlakuan KTR di Desa Komba Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara**

No.	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1	Sangat Efektif	-	-
2	Efektif	10	10
3	Cukup Efektif	10	10
4	Kurang Efektif	50	60
5	Tidak Efektif	14	20
Jumlah		84 KK.	100

*Sumber Data: Data Questioner dari Responden 2014*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemberlakuan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Desa Komba sebagai berikut : sejumlah 10 KK atau 10 % Responden menilai efektif, sebanyak 10 KK atau 10 % Responden menilai Cukup efektif, sejumlah 50 KK atau 60 % Responden memberi tanggapan Kurang efektif dan sebanyak 14 KK atau 20 % Responden member tanggapan Tidak efektif Berdasarkan prosentase kerja Kepala Desa tersebut diatas, terlihat bahwa Kepala Desa Kurang efektif dalam menjalankan pemberlakuan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Desa Komba.

Faktor penghambat tidak efektifnya pembinaan kawasan tanpa rokok di desa komba karena kurangnya dukungan dari masyarakat yang masi susah meninggalkan kebiasaan merokok sebagaimana yang di katakana oleh kepala desa komba.

“Kawasan Tanpa Rokok merupakan program pemerintah, kami hanya menerapkan program tersebut dan sejauh ini masih kurang maksimal, dan itu tidak bisa di pungkiri mengingan pemberlakuan KTR ini baru diberlakukan

dan juga mayoritas masyarakat Desa Komba ini perokok jadi walaupun sejauh ini KTR di Desa kami belum efektif atau maksimal itu tidak bisa dipungkiri. Kawasan Tanpa Rokok ini hanya diterapkan di tempat-tempat tertentu saja, Seperti di Kantor Desa, Sekolah, Rumah-rumah warga, dan tempat Ibadah. Walau belum begitu efektif tap saya yakin kedepan Insyaallah Kawasan Tanpa Rokok di Desa Komba bisa maskimal saya juga berharap Semoga kedepan cakupannya bisa lebih luas lagi tergantung dukungan dari masyarakat” (Lancar 26 Maret 2014).

Faktor lainnya adalah, walaupun program pemberdayaan banyak mengemukakan keberhasilan-keberhasilan namun diakui juga bahwa ada banyak program yang tidak berhasil dan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program baik berasal dari kepribadian individu dalam komunitas maupun juga berasal dari sistem sosial.

Kendala yang Pemerintah hadapi dalam hal Pembangunan dan juga Pembinaan adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang bersifat individual sehingga program yang dijalankan terkesan lamban. Selain itu SDM masih sangat minim dimana masyarakat Desa Komba sebagian besar hanya tammata SD bahkan tidak sampai tamat SD sehingga pembinaan yang dilakukan, masyarakat tidak begitu dipahami, seperti tabel berikut:

**Tabel 15.**  
**Tingkat pendidikan masyarakat Desa Komba Kecamatan Limbong**  
**Kabupaten Luwu utara**

No.	Uraiaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	2	3	4
1.	Jenjang SD	45	50
2.	Jenjang SMP	15	20
3.	Jenjang SMA	14	20
4.	Perguruan Tinggi	10	10
	Jumlah	84 kk	100 %

*Sumber Data: Kantor Desa Komba tahun 2014*

Dari beberapa penjelasan diatas perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi dalam suatu program tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah.

Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber dari luar organisasi.

**a. Faktor Internal**

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di Desa Komba yaitu SDM yang kurang terampil seperti tabel berikut:

**Tabel 16.**

**Data pegawai di Desa Komba**

No.	Uraian	Jumlah pegawai	Dibutuhkan	Kurang
1	SD	-	-	-
2	SMP	4	-	-
3	SMA	3	2	2
4	Perguruan Tinggi	-	2	2

*Sumber Data: Kantor Desa Komba tahun 2014*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Desa Komba masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan Desa, seperti tugas penataan pertamanan, kebersihan Desa, keindahan Desa dan lain-lain.

Selain aspek dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi pemerintah Desa Komba adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan. Kualitas aparat yang ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan.

“Rendahnya kualitas aparat pemerintahan desa dalam kehidupan berorganisasi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, karena rata-rata diantara mereka hanyalah tamatan SMP dan SMA, tetapi untungnya kepala desa memiliki andil yang sangat besar dalam pengembangan potensi yang ada di desanya”(Haspin 27 Maret 2014).

Faktor prasarana kerja yang juga menjadi faktor penghambat efektifnya pelaksanaan pengembangan organisasi misalnya masih terbatasnya kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh petugas khususnya yang membawahi bagian administrasi misalnya saja dalam mengantar surat penting di kantor-kantor. Faktor dana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi, baik digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan secara administratif maupun untuk operasional tugas organisasi itu sendiri. Penggunaan dana khususnya bagi aparat meliputi tujuan antara lain untuk pemberian insentif, hal ini menjadi penting sebagai alat motivasi supaya petugas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADD) yang dialokasikan bagi Kantor Desa masih minim jika dibandingkan beban tugas yang ada.

**Tabel 17.**  
**Sarana dan Prasarana Desa**

No.	Jenis Sarana	Jumlah Tersedia	Kebutuhan	Kekurangan
1	Kantor Desa	-	-	-
2	Meja	2	6	4
3	Komputer	1	2 bh	1 bh
4	Perpustakaan Desa	1	-	-

*Sumber Data: Hasil Observasi 2014*

## b. Faktor Eksternal

Aspek yang bersifat eksternal dalam hal ini adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat mengatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat mentaati aturan dalam organisasi sehingga kurang efektifnya pengelolaan organisasi.

“Efektifnya aturan dalam badan pengelolaan organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk memperoleh atau melaksanakan pembangunan. Namun hal tersebut yang kurang terlihat adalah masyarakat di kawasan, masih rendah partisipasinya dalam memperoleh tujuan organisasi. Sehingga hal ini kadangkala terjadi setelah mendapat teguran dari aparat, hal itu bukan karena masyarakat tidak mau mengurus organisasi atau sengaja melanggar tetapi lebih banyak mereka tidak tahu mengenai pengelolaan organisasi. Hal itu tidak lain karena sosialisasi aturan ini bagi masyarakat tersebut masih kurang”.(Marjan 28 Mei 2014)

### a. Hubungan antar status

Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. berikut wawancara peneliti kepada salah satu tokoh masyarakat.

“Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah. Susunan status dalam satu kelompok dalam organisasi selalu tampil dalam 2 wujud yaitu berupa status formal dan status sosial. Status formal adalah berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang ada dalam kelompok atau organisasi yang berkaitan langsung dengan rantai komando. Status sosial tidak selalu berkaitan dengan status formal seseorang, walaupun dapat saja seseorang

yang mempunyai status formal yang tinggi dapat pula mempunyai status sosial yang tinggi.

Lebih lanjut ia mengatakan.

“yang dapat menundukkan seseorang dalam status adalah :

1. Kemampuan fisik, mental dan sosial berbeda yang biasanya timbul karena perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman.
2. Tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekerjaan
3. Tingkat pentingnya pekerjaan”.(Harjun 29 Mei 2014)



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab dimuka, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan fungsi dan peran Kepala Desa dalam Membangun desa berjalan dengan cukup baik, dimana sebagai fungsi dan perannya sebagai pemimpin desa, dapat membawa Desa kearah yang lebih baik, begitupun dalam hal pembangunan, dalam pembangunannya meliputi, pembangunan perairan, janan tani, jembatan gantung dan pembangunan SMP Satu Atap Limbong sudah bermanfaat dan efektif dirasakan oleh masyarakat Desa Komba. Adapun faktor yang masih menghambat adalah kurangnya dukungan dari masyarakat yang masih menunggu perintah dari pemerintah desa sehingga pembangunan berjalan lambat.
2. Adapun yang menjadi hambatan dalam Membina masyarakat desa adalah kurangnya SDM masyarakat karena tingkat pendidikan yang relative rendah sehinggal proses pembinaan berjalan cukup lamban, begitupun dalam hal infrastruktur, karena terbatasnya wilayah sehingga dukungan infrastuktur tidak begitu memadai sehingga pembinaanpun berjalan lamban, namun walu demikian proses kegiatan yang

dilaksanakan kepala desa berjalan cukup baik terbukti Kepala Desa mampu membina masyarakat yang meliputi pembinaan kelompok tani, pembinaan keagamaan, pembinaan olahraga dan pembinaan pkk, adapun pembangunan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak begitu efektif karena kendala yang masih belum bisa ditinggalkan oleh masyarakat desa komba, Adapun faktor penghambatnya KTR, tokoh masyarakat yang harusnya dianggap panutan untuk masyarakat justru masih melanggar aturan KTR, sehingga masyarakat semakin sulit meninggalkan kebiasaan merokok yang sudah lama dilakukan

## **B. Saran-saran**

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan peran Kepala Desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan Desa Komba dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut:

1. Saran bagi pembangunan pengairan kesawah, jalan tani, jembatan gantung dan Sekolah SMP agar selalu dilakukan pengawasa dan memantau langsung sehingga bila ada kerusakan atau kekurangan agar secepatnya di perbaiki agar masyarakat desa komba dapat merasakan manfaat pembangunan dalam waktu yang cukup lama.
2. Adapun Saran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dihimbau kepada tokoh tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat penting didesa komba agar memberikan contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah di terapkan oleh pemerintah desa.

Kepala desa harusnya melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah menerima peraturan yang telah diimplementasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Irawan dan M.Suparmoko, 2002. *Ekonomi Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 2005. *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prof. DR. Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- R. Bintoro, 2003. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soegiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabera, Bandung.
- Soetadjo Kartohadikoesoemo, Cetakan Pertama, 2004. *Desa*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2002. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. T. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.

<http://www.scribd.com/doc/116501541/Peran-Kepala-Desa-Dalam-Otonomi-Desa-Ratih-Probosiwi>

